**DAFTAR PUSTAKA**

Abdillah, Baikuni, 2011, Gotong Royong Sebagai Budaya Bangsa, Humaniora utama, Bandung.

Arikunto, Suharsimi, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka cipta,Jakarta.

Bintarto, 1980, Gotong Royong Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia, PT. Bina Ilmu Surabaya, Yogyakarta.

Brodjonegoro, Bambang PS dkk, 2009, Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta.

Domain, Tjahjanudin, 2010, Kebijakan Kerja sama Antar Daerah Dalam Perspektif Sound Governance, Jenggala Pustaka Utama, Surabaya.

Faisal, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), Malang.

Koejtaraningrat, 1974, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1990, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta.

Kontjaraningrat, 2009, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Marzali, A., 2005, Antropologi Pembangunan Desa, Prenada Media, Jakarta.

Patterson, D.A., 2008, Intergovernmental Cooperation. Albany, New York State Department of State Division of Local Government Services, NY.

Pratikno (eds), 2007, Kerjasama Antar Daerah, Kompleksitas dan Tawaran Kelembagaan, UGM, Yogyakarta.

Sajogyo dan Pudjiwati, 2005, Sosiologi Pedesaan, Gadjah Mada University Press, Yogjakarta.

Setiadi, E.M. dan Kolip, U., 2011, Pengantar Antropologi, CV Maulana Media Grafika, Bandung.

Setiadi, E.M. dan Kolip, U., 2011, Pengantar Sosiologi. Kencana Prenada Group, Jakarta.

Soekanto, S., 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D, Alfabeta, Bandung.

**JURNAL**

Agustina Putra (2012). Analisis Kegiatan Gotong royong dalam Meningkatkan pembangunan Gampong Alue Raya Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat.

Ajat Sudrajat, (2014).Nilai-Nilai Budaya Gotong Royong Etnik Betawi Sebagai Sumber Pembelajaran IPS,Universitas Pendidikan Indonesia.

Ardhi Satria K (2014). Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pemanfaatan Air Umbul Cokro. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ega Ramadayanti, “COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement” (<http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>Diakses pada 20 April 2020, 2020)

Hermawan, yulius purwadi. (2020). LANSKAP KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL PASCA COVID-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3879.65-73>

Muji Slamet Lestari, 2015, *Pergeseran Nilai Gotong Royong Dalam Pengolahan Lahan Pertanian Desa Pulung Kencana*, Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Jurnal, hal.1-2.

Pakpahan AK. (2020). COVID-19 DAN IMPLIKASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64

Silfiana, 2018, *Optimalisasi Fungsi Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Dalam rangka Pembangunan Daerah Kawasan JABODETABEKJUR*, Jurnal UNTIRTA, Voume 8, Nomor 2 Oktober 2018, Hal. 255.

Tarigan, Antonius. (2009) Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah.

World Health Organization. Whole-of-society pandemic readiness. Geneva. Available from: http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/2009-0808\_wos\_pandemic\_readiness\_final.pdf; 2009 [accessed 06.15.16]. World Health Organization. Strategic Alliances: the roles ofcivil society in health, discussion paper No. 1. Geneva. Available from: http://www.who.int/civilsociety/documents/en/alliances\_en.pdf;

Yeremias T. Keban (2007). Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk Dan Prinsip.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

**INTERNET**

https://pemerintahansetda.bulelengkab.go.id/artikel/kerjasama-antar-daerah-https://www.setneg.go.id/baca/index/pentingnya\_kerja\_sama\_pemerintah\_pusat\_dan\_daerah\_dalam\_pena ganan\_covid\_19

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022>

https://mediaindonesia.com/read/detail/343531-menggerakkan-umkm-sebagai-dinamisator-ekonomi-di-kala-pandemi

<https://manadopost.jawapos.com/opini/30/06/2020/pentingnya-kerja-sama-daerah-dalam-menghadapi-covid-19-dan-new-normal/>,

<http://nasional.sindonews.com/berita/1558666/15/hadapi-wabah-virus-corona-pusat-dan-daerah-harus-kompak>

<https://tirto.id/eQeA>. Bagaimana Cara Taiwan Melawan Pandemi Covid-19?

**LAMPIRAN**

Pentingnya Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Covid-19



Menghadapi dampak pandemi global Covid-19, Presiden Joko Widodo mengajak kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi erat antara keduanya amat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19 hingga ke daerah-daerah.

"Yang paling penting menurut saya bagaimana kerja sama antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah. Dari yang paling atas, presiden, sampai nanti di kepala desa. Ini penting sekali," kata Presiden selepas meninjau kesiapan rumah sakit darurat penanganan Covid-19 di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu, 1 April 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebut Presiden dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah agar berada dalam satu garis visi yang sama.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi aturan pelaksanaan dan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

"Kita ini bekerja berdasarkan aturan undang-undang yang ada. Kita bekerja juga karena amanat konstitusi. Jadi pegangannya itu saja. Kalau ada Undang-Undang mengenai Kekarantinaan Kesehatan ya itu yang dipakai," kata Presiden.

Presiden memastikan bahwa langkah-langkah yang kini ditempuh oleh pemerintah merupakan langkah yang sebelumnya telah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, baik kondisi geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, maupun kemampuan fiskal. Pemerintah bahkan juga telah mempelajari langkah-langkah dan kebijakan yang ditempuh sejumlah negara dalam menangani kasus Covid-19.

"Kita tidak mengambil jalan yang itu (*lockdown*). Kita aktivitas ekonomi tetap ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting. Kita sampaikan sejak awal, *social distancing* atau *physical distancing* itu yang paling penting," kata Presiden. **(Humas Kemensetneg)**

# Pentingnya Kerja Sama Daerah dalam Menghadapi COVID-19 dan New Normal

[OPINI](https://manadopost.jawapos.com/opini/)



Penulis: Dr. Welly Waworundeng, S.Sos., MSi.

mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota.

Kerjasama daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Para kepala daerah gubernur atau bupati/walikota berperan penting dalam menciptakan adanya kerja sama antar daerah, karena mereka bertindak mewakili daerah untuk dan atas nama daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan daerah lain.

Kerja sama daerah memiliki 2 kategori yaitu, kerja sama wajib dan sukarela. Kerja sama wajib dilaksanakan oleh 2 daerah atau lebih daerah yang berbatasan untuk menyelenggrakan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas litas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dilkelola bersama.

Kerja sama sukarela, dilaksanakan oleh 2 atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksnakan dengan bekerja sama.

Objek kerja sama antar daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Daerah menetapkan prioritas objek kerja sama daerah berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama Antar Daerah dan penerapannya, sebenarnya telah lama dikembangkan di sejumlah negara di benua Eropa, seperti Jerman, Austria, Belanda, Swiss, dan sebagainya sejak puluhan tahun yang lalu. Kerja sama daerah di negara – negara Eropa tersebut terbukti telah menjadi instrumen pembangunan kewilayahan yang berhasil melahirkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penciptaan pelayanan publik yang berkualitas kepada rakyat, dan menciptakan proses integrasi sosial, budaya dan politik yang kuat.

Prinsip-prinsip dan cara kerja dasar kerja sama antar daerah dan tata kelola wilayah yang telah terbentuk terbukti cukup ampuh sebagai instrumen untuk melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan yang ingin dicapai oleh sebuah wilayah regional (Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Decentralization Support Facility, 2011).

Pola kerjasama serta bentuk kelembagaan kerjasama antar daerah yang teridentifikasi di beberapa negara, meliputi: 1) Intergovernmental Service Contract: Merupakan kontrak jasa yang dilakukan bila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, pembuangan sampah, dll. 2) Joint Service Agreement: Merupakan perjanjian kerjasama untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang bekerjasama, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol kebakaran, pembuangan sampah.  3) Intergovernmental Service Transfer: Merupakan pelimpahan secara permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik (Henry, N. 1995; Pratikno (Ed.), 2007).

Selain tiga tipe kerjasama di atas, kecenderungen yang terjadi saat ini di negara – negara maju adalah pencanangan kerjasama dengan konteks networking/kolaborasi/jejaring terutama di bidang perencanaan dan mitigasi bencana. Metode kerjasama seperti ini menjadi model alternatif untuk menggantikan model birokrasi klasik yang bersifat top down  karena sifatnya yang mengandalkan jejaring yang fleksibel dan dinamis (Waugh Jr, W.L. and G.Streib. 2006).

Kerjasama anatar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Inilah yang menjadi prinsip dasar dari kerja sama daerah yaitu adanya tujuan bersama yang ingin diraih secara bersama-sama (Tim Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010).

Berdasarkan  PP No. 28/2018,  disebutkan bahwa daerah dapat melakukan kerja sama, atara lain  karena mengatasi kondisi  darurat. Yang dimaksud dengan kondisi darurat adalah kondisi di luar kemampuan manusia, atara lain terjadinya bencana. Bencana ada 3 macam, meliputi  bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

Penyebaran COVID-19 merupakan salah satu bencana nonalam, yang oleh pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai bencana nasional melalui keputusan Presidan No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dikeluarkannya peraturan ini menandakan bahwa bencana ini serius dan mengancam kehidupan rakyat Indonesia. Untuk penanganannya,  banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan kabupaten/Kota.

Bertujuan untuk mempercepat penanganan Penyebaran COVID-19, masyarakat tetap sejahtera dan pelayanan publik tetap berjalan.  Tercapainya tujuan kebijakan sangat tergantung pada implementor dan/atau pelaksana kebijakan itu sendiri. Ada kebijakan yang hanya dilaksanakan oleh satu daerah saja, tetapi ada juga kebijakan yang harus dilaksanakan bersama antar daerah.

Kerja sama anatar daerah dalam situasi sekarang penting, karena semua daerah memiliki satu tujuan untuk menghentikan penyebaran COVID-19, mengatasi berbagai masalah akibat dari dampak bencana tersebut, dan memasuki era new normal.

Daerah secara bersama mengimplementasikan berbagai kebijakan yang sudah ada. Selain itu, secara bersama juga dapat membuat sebuah kebijakan baru untuk penanganan COVID-19, dan terlebih memasuki new normal dalam suatu wilayah regional.

Penangan COVID-19 dan penerapan new normal, membutuhkan komitmen dan ikatan yang kuat di antara pengambil keputusan tertinggi di daerah masing – masing (para kepala pemerintahan) akan mendasari kerjasama tersebut. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah disepakati, lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah.

Pemerintah daerah dan para stakeholder (DRPD, elit politik, tokoh agama/masyarakat, Perguruan Tinggi, pemimpin ormas)  di daerah dapat saling mendukung untuk adanya kerja sama antar daerah di Sulawesi Utara. Harapan kedepan kerja sama daerah yang sudah ada dapat dikembangkang dan yang belum dapat dibentuk.

Bahkan dapat dilakukan kerja sama daerah  dengan daerah di luar negeri, dan juga kerja sema daerah dengan pihak ketiga. Tujuannya, supaya walaupun ditengah bencana, program untuk meningkatkan kesejahteraan  dan pelayanan publik diberbagai bidang tetap berjalan.(\*)

**Dampak Pandemi Covid-19, Ekonomi Indonesia Diperkirakan Pulih 2022**

*Wabah Covid-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia, selain mengakibatkan mandegnya berbagai bidang usaha.*



*Proyeksi ekonomi Indonesia 2019. - Bisnis/Radityo eko*

tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia, selain mengakibatkan mandegnya berbagai bidang usaha.

Kinerja perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat lambatnya perbaikan kinerja manufaktur, khususnya di China hingga menjelang semester pertama tahun ini.

Di tambah dengan jalur distribusi logistik yang juga terganggu, dampak negatif mau tak mau akan menerpa ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Demikian kesimpulan dari Pusat Kajian Visi Teliti Saksama (VTS) melalui riset kajian berjudul *Limbung Roda Terpasak Corona.*

Menurut uji simulasi pandemi dengan model sistem dinamik oleh peneliti Visi Teliti Saksama, M. Widyar Rahman, pandemi corona di Indonesia diperkirakan reda pada awal Juni 2020. Lantas, jika wabah Covid-19 di Indonesia diperkirakan baru bisa mereda pada Juni 2020, bagaimana dengan pemulihan ekonomi Indonesia?

“Tentunya proses pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, setidaknya sampai akhir 2021,” kata Widyar, Senin (27/4/2020).

Menurut analisis Widyar, pandemi tidak akan bertahan bertahun-tahun di Indonesia. Melalui peran aktif seluruh warga negara, penurunan jumlah kasus Covid-19, seharusnya dapat lebih cepat dari perkiraan model tersebut. Namun, hal ini tetap dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya menekan penyebarannya.

“Kami memperkirakan, peningkatan permintaan barang dan jasa akan terjadi pada Ramadan dan Idulfitri, meski tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, sedikit kenaikan permintaan ini belum cukup untuk mengkompensasi cedera pada industri,” ungkapnya.

Pasalnya, pemenuhan stok yang seharusnya dilakukan dua sampai tiga bulan jelang Ramadan tidak bisa terpenuhi akibat impor yang mandek. Melihat dampaknya yang masif, kerugian yang ditimbulkan pamdemi Covid-19 tentu tidak main-main.

“Jika dibandingkan wabah SARS 2002–2003 yang juga berasal dari China, dampak negatif dari merebaknya Covid-19 terhadap perekonomian akan jauh lebih luas,” lanjutnya.

Dalam kaitan analisa dampak ini, Visi  mengumpulkan berbagai informasi untuk memperkirakan dampak yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Adapun studi dilakukan pada Februari hingga awal Maret. Analisa yang dilakukan berawal dengan melihat hubungan ekonomi antara Indonesia dan China, sebagai episentrum awal penyebaran virus.

Dalam 5 tahun terakhir, China selalu menempati tiga besar mitra dagang utama Indonesia. Malahan, sejak 2014, China merupakan negara asal impor dengan nilai terbesar bagi Indonesia.

Berdasar kategori barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal sepanjang Januari hingga Desember 2019, makin kentara ketergantungan Indonesia terhadap China. Dari ketiga kategori barang yang diimpor oleh negara ini, sebanyak 37% barang konsumsi, 25% bahan baku penolong, dan 44% barang modal jelas diimpor dari China.

Dalam hal investasi langsung, selama rentang 5 tahun terakhir (2016—2019), Indonesia menerima aliran investasi China sebesar US$13,2 miliar atau peringkat ketiga terbesar bagi Indonesia.

Selain di bidang investasi, China juga memiliki peran besar dalam sektor pariwisata di Indonesia. Dalam kurun 8 tahun, turis China meningkat jumlahnya sebanyak 309%, yaitu dari 511.000 pada pada 2010 menjadi 2,14 juta pada 2017.

Peneliti Senior Visi , Sita Wardhani menuturkan dari sisi produksi rata-rata produsen dalam negeri memiliki stok bahan baku hingga Maret dan April 2020. Jika pada bulan-bulan tersebut belum juga ada pasokan dari China atau hanya terpenuhi sedikit, proses produksi pabrik di Indonesia dapat terhambat.

“Dampak minimum pada perekonomian adalah dengan asumsi perekonomian China bangkit dan kembali aktif pada April,” kata Sita.

Ada sedikit harapan dari rilis Biro Statistik Nasional (NBS) China soal Indeks Pembelian Manajer (Purchasing Manager Index/PMI) resmi China yang naik menjadi 52 pada Maret 2020. Pada bulan Februari, ketika pandemi meninggi, PMI China hanya 35,7, rekor terendah yang pernah dialami China. Untuk informasi, angka di atas 50 menunjukkan, industri mengalami ekspansi. Sebaliknya, angka di bawah 50 menggambarkan kondisi kontraksi.

Masih menurut NBS, industri China memperoleh pemasukan 370,66 miliar yuan atau US$52,43 miliar pada Maret 2020. Nilai tersebut turun 34,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dan melanjutkan tren di Januari-Februari yang tercatat turun 38,3%. Setidaknya, menurut NBS, ada delapan dari 41 sektor industri yang disurvei mencatat kenaikan laba pada Maret. Kondisi ini lebih baik dibandingkan Januari-Februari yang mencatat hanya empat sektor mengalami kenaikan laba.

Namun, hal ini diyakini belum menandakan stabilisasi dalam kegiatan ekonomi. Pasalnya, di tengah biaya produksi yang makin tinggi karena terganggunya jalur distribusi, permintaan pasar juga belum sembuh sepenuhnya. Apalagi, ada penurunan permintaan impor dari negara lain, termasuk Indonesia.

“Namun jika masa pemulihan yang dialami China lebih lama lagi, asumsi China baru berproduksi kembali di bulan Juni, artinya proses impor baru bisa dilakukan di bulan Juli. Dengan begitu, dampak resesi yang dihadapi Indonesia akan lebih dalam lagi,” ujarnya.

Selain dialami industri mamin, lanjutnya, gangguan lebih dalam juga bakal dialami industri manufaktur lain. Dampak dari kelangkaan bahan baku ini akan membawa inflasi yang lebih tinggi karena industri manufaktur tidak mampu memenuhi permintaan dan memicu terjadinya shortage.

Di sisi lain, dengan inflasi yang tinggi, tentu rumah tangga akan menurunkan konsumsinya. Padahal kontribusi terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini adalah konsumsi rumah tangga.

“Dengan tingkat inflasi tinggi, konsumsi rumah tangga juga turun sejalan dengan daya beli yang juga menurun. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi pun dapat terpuruk lebih jauh,” ungkap Sita.

Visi Teliti Saksama  merupakan  pusat kajian dan publikasi multiplatform dari berbagai isu ekonomi, politik, sosial, hukum, dan lingkungan hidup yang berdiri 3 tahun lalu. Tim periset Visi berasal dari berbagai perguruan tinggi terkemuka, dengan pengalaman terlibat dalam pembuatan beragam kebijakan di bidang komoditas, perdagangan, dan program komunikasi. Hasil kajian-kajian yang bermanfaat bagi masyarakat luas dituangkan dalam portal berbasis data *validnews.id.*

Menggerakkan UMKM Sebagai Dinamisator Ekonomi di Kala Pandemi

SETELAH Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah sebesar Rp123 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan update dan dampak stimulus kepada UMKM yang kontribusinya 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Media Indonesia bersama Media Group berbincang dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jumat (4/9), membahas bagaimana UMKM bisa berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi. Sehingga kemudian pertumbuhan tidak terlalu dalam kontrakannya.

TANYA: Bagaimana update kondisi pelaku usaha UMKM di masa pandemi? JAWAB: Pandemi covid-19 ini diperkirakan masih berlangsung dalam satu dua tahun mendatang. Artinya dari sisi ekonomi, masih akan sangat tergantung kepada ekonomi domestik, terutama yang bisa mengadress masalah lapangan kerja, pangan dan kesehatan. Tiga aspek itu yang sekarang paling nyata kita hadapi. Angka pengangguran dna kemiskinan terus meningkat karena pandemi ini membuat orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, yang berakibat daya beli turun. Kedua, sekarang selain ada ancaman krisis pangan seperti yang Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) ingatkan, sekarang konsumsi masyarakat di tengah menurunnya daya beli, juga prioritas kepada kebutuhan pokok, kebutuhan sekolah dan pemeliharaan kesehatan. Maka ekonomi domestik yang bisa diandalkan yaitu UMKM. Saat ini memang UMKM terdampak luar biasa. Hal ini berbeda dengan tahun 1998, di mana krisisnya hanya terjadi di dalam negeri, sehingga dahulu UMKM tampil sebagai penyelamat ekonomi nasional, dengan ekspor naik 350%. Per hari ekspor UMKM hanya 14%. Sekarang yang terjadi krisis terjadi global. Saat ini justru berdampak UMKM, dari dua sisi, pasokan dan permintaan. Kami sejak awal Februari sudah membuka call center di kementerian untuk mengetahui apa saja dampaknya. Dari sampel yang kami lakukan, sebanyak lebih dari 200 ribu sampel, ditemukan mayoritas UMKM bermasalah di pembiayaan, menurunnya permintaan, dan terganggunya distribusi bahan baku. Survei Asian Development Bank (ADB) 17 April-22 Mei 2020 di Indonesia, mereka menemukan 48,6% usaha UMKM gulung tikar, setengah lagi tetap beroperasi di tengah gangguan pasokan dan permintaan yang rendah. Hasil ini hampir sama dengan data yang kami terima dari call center posko pengaduan. Lalu sekitar 60% UMKM mengurangi karyawan, sebesar 55% UMKM menunda/tidak ada kenaikan pembayaran upah. Ini menunjukkan memang sisi pasokan dan permintaan terganggu.

**Lalu stimulan apa yang pemerintah berikan untuk menghidupkan lagi cash-flow UMKM?**

Pemerintah sudah membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pertama mencoba membantu UMKM mengalami masalah cash-flow, terutama UMKM yang telah terhubung ke lembaga perbankan. Ada alokasi PEN sebesar Rp 123 triliun untuk program UMKM restrukturisasi hutang, penundaan pembayaran cicilan hutang selama 6 bulan. Banyak UMKM yang mengalami kesulitan membayar cicilan karena permintaan dan pendapatan turun. Lalu pemerintah juga mensubsidi bunga cicilan sebesar 6% dan subsidi pajak artinya mereka bayar 0%, lalu kami juga menawarkan pinjaman baru yang lebih lunak, dengan bunga 3%. Saat ini penyerapan program itu sudah 52,77%, memang agak rendah. Saya kira yang saat ini sudah otomatis jalan pasti program restrukturisasi hutang, namun program pinjaman modal masih rendah. Sebab kegiatan usaha sedang sepi. Sehingga pelaku UMKM agak khawatir untuk menanggung beban bunga, termasuk penyalur bank juga akan berhati-hati. Kalau situasi pandemi seperti ini, saat permintaan turun, maka kalau pelaku usaha ditawarkan pinjaman sekecil apapun bunganya, pasti risiko NPLnya tinggi. Sebab bila terjadi kredit macet (NPL), maka perfomanya akan ditanggung sendiri oleh pihak perbankan. Sementara OJK juga tidak merelaksasi%tase NPL yang diperbolehkan. Saat ini NPL maksimum bank 5% yang diperbolehkan. Ini semestinya bisa direlaksasi, tidak 5% tapi boleh sampai 10%, khusus untuk UMKM. Bagi usaha mikro yang belum terjangkau perbankan (unbankable) dan belum mendapat pembiayaan dari bank, pemerintah bantu dengan Bantuan Presiden (BanPres) produktif. Kami alokasikan itu kepada 12 juta pelaku usaha mikro, sudah diluncurkan sejak 18 Agustus dan hari ini penyerapannya sudah 61,2%. Di akhir September diharapkan sudah 100% karena kami sudah memegang 18 juta data dari daerah, koperasi, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dari kementerian lembaga. Kami sudah diminta kembali mengajukan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) nya oleh kementerian keuangan dan sudah kita kirimkan juga. Saya sudah mendapat lampu hijau dari ketua PEN, bila ada anggaran PEN pemerintah nanti yang tidak terserap, nanti akan ditambahkan lagi (ke hibah). Untuk tahun depan kami sudah mengajukan di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR, sebesar Rp 48 triliun untuk 20 juta UMKM di tahun depan. Kami perkirakan tahun depan masih di dalam situasi sulit. Untuk akuntabilitas serta pengawasannya kami cleansing betul hati-hati agar yang menerima betul-betul usaha mikro. **Bagaimana pemerintah mendongkrak permintaan yang turun?**

Dari sisi permintaan kami bantu dengan menyerap produksi UMKM dengan belanja pemerintah dan BUMN. Kami sudah minta kepada Presiden untuk menginstruksikan kementerian dan lembaga membeli produk UMKM. Ada Rp307 triliun di anggaran 2020 yang sudah disetujui untuk dibelanjakan produk UMKM. Kami sudah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), agar mempercepat proses onboarding produk-produk UMKM di laman khusus e-catalogue LKPP. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan LKPP pemerintah daerah untuk mendampingi mengkurasi produk-produk, UMKM supaya segera mendaftarkan produknya. Supaya nanti tidak harus ada pengadaan tender. Belanja pemerintah ini bukan hanya selama masa pandemi. Ini untuk seterusnya supaya bisa menyerap produk UMKM, baik produk maupun jasa, seperti pengadaan furniture, paket makanan dan minuman, rapat, alat tulis kantor dan lainnya. Dan juga dengan melibatkan e-commerce untuk transaksi Rp50 juta ke bawah. Ada Blibi.com, Tokopedia, Bukalapak. Yang punya daya beli selain pemerintah adalah BUMN. Kami sudah membuat nota kesepahaman dengan Menteri BUMN, bahwa belanja BUMN sebesar Rp 250 juta-Rp 14 miliar diperuntukan untuk UMKM. Walaupun sampai saat ini baru sembilan BUMN bergabung dengan sekitar total Rp35 triliun, lewat pasar digital BUMN. Kami sedang dalam proses bagaimana produk-produk UMKM masuk ke pasar digital BUMN supaya nanti tidak harus lewat tender. Mudah-mudahan dengan dua program besar ini, pembiayaan dan mendorong daya beli penyerapan produk, diharapkan UMKM masih bisa bertahan.

**Lalu bagaimana dengan konsumsi masyarakat yang masih anjlok?**

Ekonomi Indonesia selama lima tahun sangat mengandalkan kekuatan ekonomi domestik, yaitu belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat yang berada di atas 57%. Sehingga kita selama lima tahun masih bisa bertahan tumbuh 5% di saat negara-negara tetangga turun pertumbuhannya. Kami juga membuat kampanye Bangga Buatan Indonesia, untuk mendorong agar masyarakat berbelanja produk lokal UMKM. Tujuannya agar perputaran ekonomi bergerak.Banyak lagi program dilakukan oleh masyarakat seperti Belanja di Warung Tetangga, itu untuk menggerakan konsumsi masyarakat supaya mengkonsumsi produk-produk lokal. Selain itu, karena ada perubahan perilaku konsumen, yang kini lebih berbelanja ke online, dan data menunjukan ada peningkatan penjualan via online di kuartal II /2020  sebesar 26% dibanding kuartal II tahun lalu. Kami dorong sekarang UMKM berjualan di online. Tetapi saat ini baru 13% UMKM yang sudah masuk ke platform digital atau sekitar 8 juta pelaku usaha. Kami dorong agar akhir tahun bisa sampai 10 juta pelaku usaha. Kami juga melakukan pelatihan, pendampingan dan konsultasi baik offline maupun online, untuk UMKM beradaptasi dan berinovasi produk menyesuaikan dengan pasar dan keadaan ekonomi baru ini.

**Sejauh mana upaya afirmasi ini ada payung hukumnya, sehingga mau tidak mau akan mengunci BUMN untuk membeli produk dari UMKM?**

Pada rapat terbatas di November 2019, kami dari kementerian mengusulkan agar Presiden memerintahkan untuk pembelian produk UMKM. Waktu itu langsung disetujui. Ini memang sudah dalam bentuk ratas. Lalu pada Februari kemarin, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung membuat edaran kepada para menteri. Di dalam setiap rapat juga sudah ditekankan oleh Presiden, agar Kementerian Lembaga belanja produk UMKM. Mungkin implementasinya ini yang masih harus didorong. Kalau sekarang ada LKPP, yang akan memudahkan kalau produk yang sudah terdaftar di sana tidak lagi harus lewat tender. Saya kita kami akan terus dorong, Presiden juga akan memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan LKPP untuk memonitor realisasi belanja.

**Seberapa besar penyerapan kementerian/lembaga bisa meningkatkan ekonomi di UMKM? Sebab sampai hari ini UMKM tidak berminat mengambil kredit modal karena tidak ada kepastian serapan produk, buntutnya, stimulan PEN UMKM tidak dimanfaatkan maksimal, yang sampai hari ini hanya 52%?**

Memang sudah bisa diperkirakan, pada situasi sekarang kalau ditawarkan pinjaman baru meskipun bunga murah, penyerapannya akan rendah. Tapi nanti ini akan sangat berguna ketika ekonomi mulai bergerak. Kalau stimulan PEN UMKM dalam bentuk restrukturisasi, sudah otomatis semua menunda pembayaran dan cicilan. Stimulan yang ini sudah pasti jalan. Seberapa besar dampak dari penyerapan produk UMKM oleh kementerian lembaga dan BUMN, saya belum hitung. Tapi kalau belanja kementerian lembaga ini optimum sebesar Rp321 triliun tahun ini. Itu saya kira yang bisa menggerakan UMKM luar biasa besar. Ditambah nanti dengan BUMN. Tentu ini tidak bisa menggerakan semua. Beberapa sektor UMKM masih bertumbuh, seperti sektor pangan makanya pertanian masih tumbuh 16%. Menurut saya ini akan cukup signifikan. Sekarang yang punya daya beli siapa lagi kalau bukan pemerintah dan BUMN. Saya juga sedang mengusulkan program lain, misalnya produk UMKM seperti hasil tangkapan nelayan yang tidak bisa terserap, sudah ada perintah oleh Presiden agar dibeli oleh BUMN Pangan, dalam hal ini PT Perikanan Nusantara (Perinus). Sehingga ikan bisa disimpan di gudang beku mereka. Setelah kita inventarisir, ada gudang yang muat hingga 400 ribu ton. Lalu seperti kopi, yang pembeliannya dihentikan oleh eksportir karena permintaan sedang turun, begitu pula jagung. Sebab sekarang orang fokus pada makanan pokok. Ini kami minta agar bisa diserap BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan PT Berdikari. Saya sudah usul agar diefektifkan resi gudang. Kami harap dengan program jaminan sosial yang diperluas dan digelontorkan ke masyarakat akan membuat daya beli terjaga walaupun mungkin nanti tidak kembali normal. Maka bagaimana sekarang kita mendorong solidaritas sosial agar punya komitmen untuk belanja produk dalam negeri. Supaya dengan daya beli yang terbatas ini, kita tetap bisa mendorong perputaran ekonomi di dalam negeri.

**Bagaimana memastikan BLT Bantuan Presiden yakin tepat sasaran? Bagaimana dengan pengusaha ultra mikro yang masih unbankable?** Persyaratannya sederhana saja dengan KTP. Intinya sekarang kami menggunakan data, memastikan bantuan ini tepat sasaran tidak jatuh kepada orang kaya. Jadi kami bantu usaha mikro yang memang belum mendapatkan pembiayaan dari bank. Kalau dia berdomisili di luar alamat yang tercantum di KTP, maka harus didukung data lain, yaitu Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kepala desa. Lalu data akan didaftarkan oleh kepala dinas koperasi dari setiap kabupaten dan kota. Kami juga minta data pengajuan dari para koperasi, dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lalu Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Data itu nanti kami cleansing bersama sistem BPKP, untuk memastikan bahwa itu ultra mikro dan dengan OJK memastikan dia belum punya pinjaman. Begitu data lolos, dengan sistem Informasi Kredit Program (SIKP) kementerian keuangan, kami perintahkan kepada bank, BRI dan BNI untuk membayarkan ke yang bersangkutan by name by address. Bila belum memiliki rekening, orang itu harus membuatnya dahulu. Bagi yang sudah punya rekening, syaratnya harus saldo Rp 2 juta ke bawah. Menurut kami ini sudah tepat sasaran. Kami juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari sisi akuntabilitas. Intinya sekarang pemerintah ingin banyak membantu UMKM karena mereka dinamisator ekonomi di situasi seperti ini. Kami tahu, banyak perusahaan mikro yang modalnya dipakai untuk konsumsi keluarga karena permintaan sedang turun. Maka agar usaha bisa bertahan, kami tambahkan modal mereka, bukan pinjaman, bukan cicilan, tetapi hibah. Mungkin oleh sebagian dari mereka ini akan dipakai untuk konsumsi, tidak apa karena bisa memperkuat daya beli. Tetapi kami yakin karena mereka pelaku usaha, ketika ada tambahan modal, nantinya akan dipakai menjadi modal kerja. Mereka juga sangat hati-hati. Jadi tidak usah dicurigai. Penyerapan Produk UMKM oleh kementerian lembaga ada di e-catalogue, dan market place.

**Bagaimana dengan masyarakat umum? Ada spesifikasi UMKM? Di mana masyarakat bisa melihat produk UMKM Ini, di e-catalogue atau hanya di market place?**

Kalau e-catalogue di LKPP itu untuk belanja pemerintah dan daerah. Kalau di masyarakat saya kira di market place salah satunya. Kami sudah kerja sama dengan Blibi.com dan yang lain supaya ada halaman khusus UMKM. Sekarang juga banyak platform digital yang membantu UMKM mengakses pasar yang lebih besar, misalnya produk nelayan dari pelosok manapun sekarang bisa diakses lewat platform Aruna. Produk petani juga banyak platform ada Tanihub, Sayur Box, Hara dan masih banyak lagi. Lalu muncul inovasi digital seperti Wahyoo, membantu para warung tegal secara online. Kemudian Jahitin, menghubungkan penjahit dengan pasar yang lebih luas, lalu Titipku yang menjajakan jualan UMKM di platform digital. Ini berkembang selain di e-commerce. Lalu banyak juga yang menjual produk di media sosial. Kami di kementerian koperasi juga membuat platform digital e-brochure smesco. UMKM yang belum bisa berjualan di platform besar bisa berjualan di sini karena lebih simpel, bisa mengontak langsung penjual. Kesulitan membawa UMKM ke inovasi digital itu seperti apa? Dari catatan selama mendampingi pelatihan UMKM bersama platform digital untuk onboarding di e-commerce tidak mudah. Keberhasilannya hanya 4-10%. Tidak semua UMKM bisa berjualan di market place online. Di sana, pelaku usaha harus punya manajemen yang bisa respon cepat terhadap permintaan konsumen. Lalu kapasitas produksi, yang begitu Anda terhubung dengan platform digital besar, artinya terhubung dengan 97% wilayah Indonesia. Ketika jumlah produksi sedikit karena permodalan kecil dan tidak punya gudang, maka mereka tidak bisa bertahan di sana. Ketika, banyak brand-brand besar yang juga jualan. Sekarang pabrikan juga punya jualan di online. Jadi tidak mudah bagi UMKM. Maka kami siapkan platform yang lebih sederhana dan mereka tidak dipungut biaya sama sekali. Di daerah juga muncul platform-platform kecil. Jadi besar potensi berkembang penjualan UMKM dari offline ke online ini? Cukup besar potensinya. Sebanyak 97% wilayah Indonesia sudah bisa diakses e-commerce. Artinya termasuk juga infrastruktur kita dukungan logistik sudah cukup memadai. Sekarang yang paling selamat daripada UMKM itu yang sudah terhubung dengan market place online walaupun baru 13% atau 8 juta pelaku usaha. Ini masih relatif kecil. Kita harus percepat reformasi digitalisasi ini dan ini perlu dukungan dari kementerian komunikasi dan informasi untuk subsidi data internet. Namun seringkali terjadi permasalahan UMKM mikro di e-commerce itu banyak mendapat keluhan mengenai layanan,

**bagaimana pendampingan keahlian dalam pemasaran dan pelayanan produk untuk daya saing UMKM di e-commerce?**

Kami bekerja sama membuat berbagai pelatihan dengan platform untuk edukasi, kurasi, dan inovasi terhadap produk-produk UMKM yang memang layak untuk dijual di e-commerce. Sebab tidak semua produk UMKM bisa di sana. Maka kami memanfaatkan re-seller untuk memasarkan di e-commerce. Sebab kegiatan UMKM ini umumnya semua dikerjakan oleh chief everything officer, oleh satu orang. Mereka kalau harus jualan, produksi, pemasaran, pengemasan cepat rata-rata tidak bisa. Jadi kita memanfaatkan middleman yaitu reseller. Banyak mahasiswa yang berjualan di media sosial dan e-commerce menjadi reseller karena mereka tahu bagaimana cara menjual barang menjadi menarik di online. Ke depan reseller ini mau saya perkuat dengan agregator produk. UMKM yang kecil-kecil jumlahnya banyak, brandnya banyak tapi kapasitas produksinya tidak cukup besar. Ini pendekatannya nanti selain menggunakan reseller, saya mendapat bocoran dari Alibaba, bahwa di awal-awal lalu bukan pelaku usaha yang berjualan di onlinenya, melainkan resellernya. Kami juga sedang menyiapkan dari masukan e-commerce, soal harga. Harga cash back kalau ada diskon, penjualannya tinggi. Kami sedang mengajukan anggaran untuk subsidi kepada produk UMKM yang akan on boarding di market place untuk mendapat diskon. Subsidinya ke produknya kepada UMKM agar terjadi peningkatan jumlah penjualannya. Memang persyaratan kualitas menjadi penting terutama makanan. Marketingnya bukan soal murah dan enak, tetapi harus dari aspek higienis dan kesehatannya. Jadi pengemasannya harus dipastikan baik supaya tidak tercemar virus. Proses pembuatannya juga harus higienis lalu menjualnya pun harus ada standar kesehatannya. Presiden Jokowi memiliki program revolusi mental. Bagaiaman gaung cinta produk dalam negeri, apakah tidak ada evaluasi, satu parameter yang jelas agar masyarakat kita betul-betul cinta produk dalam negeri? Mengubah mental masyarakat tidak semudah membalik tangan. Ini perlu melibatkan gerakan yang besar, melibatkan tokoh-tokoh yang nyata untuk mengimplementasikan semua yang dia pakai di badannya, makannya adalah produk UMKM. Kalau ternyata mereka masih memakai sepatu buatan luar negeri, sudahlah itu omong kosong. Tetapi kalau masyarakat biasa, itu memang dari faktor harga. Saya di awal kabinet, mencatat ada kebijakan yang menyebabkan barang baru kena pajak bea masuk pada produk konsumsi impor seharga US $75. Akibatnya produk-produk impor yang dijual di e-commerce itu 40%-50% lebih murah dari pada produk lokal. Kemudian kami usulkan agar setiap belanja produk luar yang dikenakan pajak berada mulai dari harga yang lebih rendah lagi, yaitu di US$ 3. Setiap produk luar negeri mulai dari US$ 3 sudah dikenakan pajak. Sehingga sekarang produk lokal bisa bersaing dengan produk impor. Kementerian keuangan sudah membuat ambang batas minimum sekarang US$3. Artinya sekarang semua produk berada di dalam playing field yang sama. Walaupun kita tahu produk-produk di e-commerce itu 50% masih merupakan produk asing. Tetapi di tengah pandemi covid-19 Ini, saya kira sekarang pasokan dari luar negeri juga terganggu. Ini momentum bagi kita untuk belanja barang dalam negeri agar kita bisa substitusi dari produk luar negeri. Jadi catatannya perubahan mental kita ini harus kerja jangka panjang. Tapi sekarang sudah muncul di lingkungan kantor, solidaritas sosial membeli di antara teman. Pasar Indonesia sendiri 260 juta. Kalau perdagangan antar pulau, lalu konsumsi masyarakat kita dorong konsumsi produk dalam negeri dan mengurangi impor, produk perdagangan juga saya kira juga harus makin ketat pintunya. Jangan terlalu banyak impor juga. Kalau ini jalan, perputaran ekonomi saya kira juga akan cukup baik. Karena kalau kita beli produk makanan dari daerah dan rakyat tentu akan menggerakan pasokan dari peternakan, pertanian dan perikanan. Apakah perlu menciptakan tag line yang bisa mewujudkan revolusi mental itu sendiri menjadi penting? Berkaca cari satu suara wonderful Indonesia, kita juga punya tagline cinta produk dalam negeri. Tinggal bagaimana komunikasinya di masyarakat bisa tepat sasaran. Usul saya kita fokus di kelas menengah atas untuk beli produk dalam negeri. Kelas menengah bawah sudah tidak beli produk asing dengan dana mereka yang terbatas sedang turun daya beli. Yang punya uang itu sekarang justru kelas menengah atas. Saya sudah tanya Bank Indonesia, duitnya (kalangan menengah atas) masih banyak di bank. Tetapi mereka sekarang menahan konsumsi karena ada perasaan krisis. Ini yang saya kita harus didorong. Kami pemerintah sekarang sedang fokus bagaimana pertumbuhan ekonomi di kuartal ke III/2020 bisa positif. Tujuannya supaya Indonesia tidak masuk ke krisis ekonomi, dimana berturut-turut selama dua kuartal sebelumnya menunjukan angka negatif. Caranya yaitu mendorong belanja pemerintah pusat dan daerah termasuk juga BUMN. Namun yang masih berat untuk ditingkatkan adalah konsumsi masyarakat. Apakah penggunaaan tagline bisa betul-betul menggugah masyarakat saya tidak terlalu yakin. Tetapi yang penting distop keran impornya. Jangan banyak yang mengambil rantai di sana. Kalau terus impor produk luar negeri, mati (produk) yang di dalam negeri. Kalau menunggu kesadaran masyarakat sudah pasti lama. Maka langsung saja kerannya ditutup. Soal impor ini sudah ada koordinasi tingkat menteri atau sudah dirataskan? Presiden sudah bilang di ratas kepada Menteri Perdagangan untuk setop. Tapi nanti kementerian perdagangan rekomendasinya untuk impor itu ada di kementerian ekonomi dan teknis. Landasan dan komitmen telah dilakukan pemerintah dalam pandemi ini. Apakah dalam konteks pandemi ini UMKM bisa 'take off' dan pada akhirnya menggerakan perekonomian guna menahan laju kontraksi ekonomi di kuartal ketiga? Pilihan satu-satunya saya kira memang untuk menggerakkan ekonomi supaya kita tidak masuk ke dalam krisis, pilihannya tidak banyak. Pilihannya UMKM. Alasannya sekarang kalau industri besar apalagi pasarnya ekspor, sudah pasti tidak akan yang beli saat ini. Kalau UMKM karena terkait dengan pendapatan langsung masyarakat terkait dengan perut maka perut harus tetap ngebul, untung dikit juga tidak apa karena dikerjakan sendiri. Di sana fungsi di dalam dinamisator ekonominya. Ekonomi kira dalam satu dua tahun ke depan, saya yakin kekuatan ekonomi kita akan sangat  tergantung kepada ekonomi domestik dan itu adalah UMKM. Saya kira sudah benar dan Presiden sudah perintahkan agar seluruh kebijakan ekonomi harus betul-betul betul mendukung UMKM, membantu mulai dari pembiayaan, melakukan edukasi bagaimana mereka harus beradaptasi dan inovasi produk sesuai permintaan pasar. Juga bagaimana menggerakkan permintaan produk UMKM. Oleh karena itu program jaminan sosial seperti menyalurkan pembiayaan ke rakyat saya kira untuk memperkuat daya beli. (X-15)

Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/343531-menggerakkan-umkm-sebagai-dinamisator-ekonomi-di-kala-pandemi>

**Hadapi Wabah Virus Corona, Pusat dan Daerah Harus Kompak**

[**Koran Sindo**](https://index.sindonews.com/reporter/1584/koran-sindo)

Selasa, 17 Maret 2020 - 06:10 WIB

loading...



**JAKARTA** - Semua pihak hendaknya kompak dan bersatu dalam mengatasi wabah corona (Covid-19). Kesadaran ini diperlukan agar langkah yang diambil, baik itu oleh pemerintah pusat, daerah maupun kalangan pengusaha, tetap sinkron dan tidak justru memicu kekacauan di tengah masyarakat.

Pesan senada kemarin disampaikan Kepala BNPB yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Korona (Covid-19) Doni Monardo. Dia menekankan upaya menekan penyebaran korona membutuhkan kerja sama seluruh komponen bangsa.

Hingga kemarin kasus corona terus menunjukkan peningkatan dengan DKI Jakarta sebagai episentrum utama penyebaran utamanya. Berdasar update teranyar dari Kementerian Kesehatan, ada tambahan 17 pasien positif hingga total kasus menjadi 134. Dari kasus baru tersebut, 14 kasus di antaranya berasal dari Jakarta, sisanya dari Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

“Harus kompak, harus bersatu, harus bisa menunjukkan sikap gotong-royong yang baik, saling membantu,” ujar Doni Monardo dalam jumpa pers di Ruang Serbaguna Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB Jakarta, kemarin.
Kekompakan dimaksud antara lain antara pemerintah pusat dan daerah. Doni mengimbau pemerintah daerah berkonsultasi terlebih dahulu dan tidak sembarangan dalam mengeluarkan kebijakan penanganan virus ini. Menurut dia hal tersebut menindaklanjuti arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan Covid-19.Konsultasi pemerintah daerah untuk penanganan korona, lanjutnya, dilakukan ketika ada rencana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. “Pemerintah daerah dapat mengambil langkah kebijakan dengan metode pembatasan interaksi sosial atau social distancing. Di sisi lain kebijakan pemerintah daerah harus pula merujuk pada protokol yang sudah disiapkan pemerintah pusat terkait kegiatan belajar mengajar, kegiatan beribadah hingga aktivitas bekerja secara daring atau online. Hal ini ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat,” jelasnya.
Doni juga mengingatkan perlunya kerja sama seluruh komponen untuk menekan penyebaran virus ini. “Harus ada kerja sama seluruh komponen masyarakat. Seluruh komponen bangsa dan negara harus kompak. Mudah-mudahan dengan saling kerja sama mengikuti anjuran dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah, penyebaran virus ini akan bisa ditekan,” tegasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan agar pemda tidak mengambil kebijakan semaunya dalam menangani corona. Misalnya saja terkait kebijakan penutupan suatu wilayah atau lockdown, dia menegaskan bahwa itu merupakan kebijakan pemerintah pusat dan pemda tidak boleh membuat kebijakan lockdown meskipun hanya untuk di wilayahnya.
“Perlu saya tegaskan yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil pemerintah daerah,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.